



## **SAMBUTAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Pada Acara

### **PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH**

Rabu, 26 Juli 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Baju lurik berwarna hitam***

***Dipakai pengantin si anak Jawa***

***Kami awali sambutan dengan salam***

***Salam keselamatan untuk semua***

***Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,***

Yth. Para Narasumber:

1. Anggota KPU RI
2. Dirjen Keuangan Daerah

Yth. Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat;

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;

Hadirin, Tamu Undangan yang Kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan lindungan-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan **Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah** dengan tema "***Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024***", dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya, selawat dan salam untuk nabi dan junjungan, Rasulullah Muhammad SAW., yang telah mewasiatkan Al-Quran dan Sunnah; dua pedoman yang akan memandu kita semua pada keselamatan dan kebahagiaan di dunia, dan akhirat kelak. *Allaahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aalihii wa shohbihii wa salliim.*

***Hadirin dan Undangan yang kami hormati,***

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2024, akan dilaksanakan Pemilihan Umum Serentak, yaitu pada tanggal 14 Februari Pemilihan Umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR)

RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan pada tanggal 27 November akan dilaksanakan Pilkada yang akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pilkada tersebut merupakan sarana kedaulatan rakyat, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak adalah tingkat partisipasi pemilih. Pada pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 jumlah partisipasi pemilih 81%. Angka ini lebih tinggi dari target dalam RPJMN 2015-2019 yang sebesar 77,5%. Harapan Kami, kesuksesan pencapaian target partisipasi pemilih ini dapat terulang atau bahkan lebih tinggi pada pelaksanaan pilkada dan pemilu serentak 2024. Sebagai catatan, target tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada dan pemilu tahun 2024 dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebesar 79,5%.

Indikator selanjutnya yakni situasi yang tertib dan tentram menjelang, selama, dan paska pelaksanaan pilkada dan pemilu serentak tahun 2024. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengawal pelaksanaan Pilkada dan Pemilu Serentak tahun 2024 mulai dari tahapan pelaksanaan hingga pemungutan suara. Perlu dilakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan apapun yang berpotensi menghambat pelaksanaan Pilkada dan Pemilu serentak nanti.

### ***Hadirin dan Undangan yang berbahagia***

Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menyukseskan pilkada dan pemilu serentak tahun 2024. Untuk itu, pada kesempatan ini, **Kami minta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan secara aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Dukungan ini mencakup:**

***Pertama, dukungan anggaran,*** sesuai amanat Pasal 166 ayat (1) UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa pendanaan Kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota meliputi anggaran penyelenggaraan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan anggaran pengamanan kepada TNI/Polri. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 membutuhkan biaya yang sangat besar dan tentunya mempengaruhi proses pembangunan di daerah. Akan tetapi karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, mau tidak mau pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada yang sudah menjadi agenda nasional tersebut.

Untuk mengurangi beban pemerintah daerah dalam pendanaan pilkada tersebut, Permendagri 54/2019 membuka peluang untuk *sharing* anggaran antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, pemerintah provinsi dapat membantu Pendanaan Kegiatan Pemilihan. Sebaliknya, dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan

keuangan daerah untuk kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Pemerintah kabupaten/kota juga dapat membantu.

***Anak Salayo duduk berlima***

***Duduk berjejer di pinggir sawah***

***Kalau amanah kita emban bersama***

***Penyelenggaraan Pemilu akan lebih mudah***

***Hadirin dan Undangan yang berbahagia***

Pendanaan pilkada serentak tahun 2024 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat melalui hibah kepada KPU dan Bawaslu telah mengakomodir mekanisme *sharing* anggaran ini. Dari anggaran hibah kepada KPU Provinsi sebesar 143 milyar rupiah, kurang lebih Rp90 miliarnya merupakan komponen pembiayaan dari APBD Provinsi yang meliputi: pembiayaan Pembentukan dan pembubaran PPK, PPS, KPPS dan PPDP; Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS; Perlengkapan Pemungutan; Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Suara; Distribusi Logistik PP dan Arus Balik termasuk komponen pendukung lainnya; Santunan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Adhoc; serta Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Sedangkan dari total anggaran hibah kepada Bawaslu yang sebesar Rp41 miliar, kurang lebih Rp25 miliarnya merupakan komponen pembiayaan dari APBD Provinsi yang meliputi Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D dan Pengawas TPS, serta Bimtek/Pelatihan Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan.

***Kedua, dukungan dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan dalam pelaksanaan pilkada.*** Pada aspek ini, Pemerintah Provinsi sendiri memberikan hibah pengamanan sebesar Rp7,5 miliar kepada Polda Sumbar dan Rp4,9 miliar kepada TNI/Korem 032 Wirabraja. Di samping itu, Pemerintah Provinsi juga membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah melalui Keputusan Gubernur Nomor 200-338-2023 yang bertugas untuk: memotret dinamika sosial politik di daerah, kesiapan partai politik, pelaksanaan Pendidikan politik oleh partai politik, ormas, penyelenggara pemilihan, dan kelompok kepemiluan lainnya yang ada di daerah; dan melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini guna meminimalisir terjadinya konflik sehingga stabilitas politik tetap terjaga.

***Ketiga, dukungan pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan pilkada*** melalui kegiatan pendidikan politik

kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih. Pada 2022 telah diberikan kepada masyarakat sebanyak 2.300 orang, sedangkan pada 2023 akan diberikan kepada masyarakat dengan target 8.000 orang. Kegiatan pendidikan politik tersebut akan dilaksanakan di 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

***Anak Banuhampu membuat gasing***

***Gasing dijual di Pakan Sinayan***

***Partisipasi pemilih merupakan hal penting***

***Mari bersama kita tingkatkan***

***Pergi memancing si ikan bilih***

***Diberi umpan si cacing sawah***

***Semakin tinggi partisipasi pemilih***

***Semakin besar legitimasi kepala daerah***

***Hadirin dan Undangan yang berbahagia***

Memperhatikan sentralnya peran dan dukungan kita selaku pemerintah daerah dalam menyukseskan hajatan demokrasi 2024 nanti, maka pada kesempatan ini Kami mengajak kita semua untuk memperkuat berkomitmen, menyamakan persepsi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, memberikan dukungan kepada penyelenggara dan



pihak keamanan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Barat.

Besar harapan Kami, melalui Rapat Koordinasi ini kita dapat menyamakan persepsi dan melahirkan kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di Sumatera Barat.

***Hadirin dan Undangan yang berbahagia,***

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah dengan tema "***Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024***",, dengan ini Saya nyatakan ***dibuka secara resmi.***

***Minum es teh bercampur leci***

***Pelepas dahaga di saat penat***

***Selamat mengikuti rakor dekonsentrasi***

***Semoga berbuah hasil yang bermanfaat***

Kepada Allah *subhanahuwata'ala* kita berserah diri, semoga Yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita semua, *amin ya rabbal alamin*.

*Terima kasih*

*Wabillahitaufik Walhidayah*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MAHYELDI**